



Praktik Perjokian Wali Juga Marak

■ Disdikpora Kota Yogya Segera Evaluasi PPDB Jalur Zonasi

YOGYA, TRIBUN - Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY membongkar praktik menitip Kartu Keluarga (KK) dengan status famili lain dalam proses Peperiksaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di Kota Yogya. Diketahui, praktik itu diterapkan secara masif dan berkelanjutan untuk persiapan PPDB tahun berikutnya.

Tidak sebatas menyajikan hasil temuannya, ORI DIY pun bakal membahasnya dengan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki pelaksanaan PPDB di masa mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai mudahnya akses warga masyarakat dalam melakukan proses perpindahan data penduduk atau KK, baik antar atau dalam kabupaten kota.

"Minggu depan kami akan pertemuan multi pihak dengan Disdikpora, Disdukcapil dan kelurahan, untuk membahas temuan ini. Karena ini sedikit banyak juga disebabkan oleh perpindahan KK yang jauh lebih mudah prosesnya," ujar Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi, Kamis (13/7) sore.

Ia pun mencontohkan, dewasa ini, untuk beralih kartu keluarga, seorang warga negara tidak perlu lagi surat pengantar dari RT, RW, sampai kelurahan. Hanya saja, Budhi bisa memahami, kebijakan tersebut merupakan bagian dari sebuah reformasi positif, di mana prosedur birokrasi dipangkas agar menjadi praktis.

"Tapi, mekanisme baru ini, meniadakan peran kontrol ke-

PRAKTIK CURANG

- ORI DIY bongkar praktik titip KK dengan status famili lain saat PPDB.
- Ada juga praktik perjokian wali saat PPDB jalur zonasi.
- Disdikpora Kota Yogya akan mengevaluasi pelaksanaan PPDB.

lurahan dalam mengecek keluar masuk warganya. Kami juga ke kelurahan itu menanyakan, mereka tidak mengetahui perpindahan warga yang numpang KK di wilayahnya," ungkapnya.

Selain itu, ORI DIY menelusuri profil masing-masing anak yang terindikasi numpang KK, yang rata-rata merupakan anak dari anggota kepolisian, PNS, guru di SMP yang bersangkutan, hingga notaris. Sementara, ketika diusut KK asalnya, alamat orang tuanya pun cenderung

jauh dan di luar ring zonasi sekolah itu, sehingga dugaan titip KK makin menguat.

"Proses perpindahan sebagian besar diinisiasi oleh orang tua yang anaknya pernah sekolah di situ. Terus, dia minta pemilik KK menerima penitipan anaknya dan orang tua lainnya yang dibantu," katanya.

Tak berhenti sampai di situ, setelah ditempuh proses pendalaman, ORI DIY menemukan fakta delapan anak di antaranya sudah pindah KK sejak 2022 atau satu tahun sebelum PPDB, untuk memenuhi persyaratan. Sementara, dua anak lainnya, bahkan sudah hijrah menuju alamat barunya yang lebih dekat dengan sekolah tujuan tersebut sejak 2021 silam.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, selain fenomena menitip KK, praktik perjokian wali pun masih dijumpai dalam gelaran PPDB untuk jenjang SMP di Kota Yogya. Tapi, praktik tersebut memanfaatkan jalur perpindahan orang

tua, dengan peluang diterima dapat dikatakan jauh lebih besar, sepanjang kuota di sekolah yang hendak dituju masih ada dan tersedia.

"Ada empat anak yang diduga kuat pakal perjokian wali. Dia pakai jalur perpindahan orang tua. Jadi, ada kerabat kerja orang tuanya yang baru pindah, terus dijadikan wali anaknya supaya bisa dafar lewat jalur perpindahan orang tua," ulasnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogya, Budi Santosa Asrori, menyatakan, siap melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB. Ia tak memungkiri, praktik-praktik dugaan kecurangan seperti titip KK dan lain sebagainya, selalu menjadi perhatian Pemkot Yogya, guna memperbaiki proses PPDB ke depan.

Tentu menjadi perhatian kami, ke depan akan kami evaluasi lagi. Itu fenomena nasional, kan. Nanti kami koordinasikan permasalahan ini dengan Disdukcapil juga," ungkap Budi. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005